



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotabaru

RENJA 2021

PLANNING →



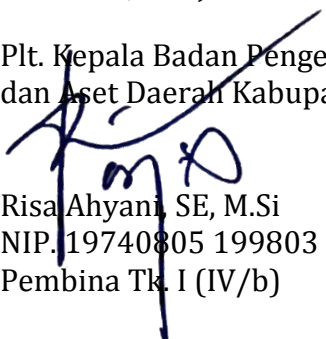
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan curahan rahmat dan karuniaNya pada kita semua. Karena atas izin dan kehendakNya juaah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Kotabaru, 23 Juli 2020

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



Risa Ahyani, SE, M.Si
NIP. 19740805 199803 1 001
Pembina Tk. I (IV/b)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : HASIL EVALUASI TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.....	25
B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan	25
BAB V : PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru
2. Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotabaru
3. Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kotabaru

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota (hal. 3)
2. Gambar 2 : Proses Penyusunan Renja (hal. 3)
3. Gambar 3 : Alur Perencanaan dan Penganggaran (hal. 4)
4. Gambar 4 : Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (hal. 5)

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penetapan Tim Penyusunan Renja Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan, RENJA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahunan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2021.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPKAD mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun tahun berjalan;
- b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016–2021;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
- d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan RENJA 2021 BPKAD mengacu Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 dengan Visi Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

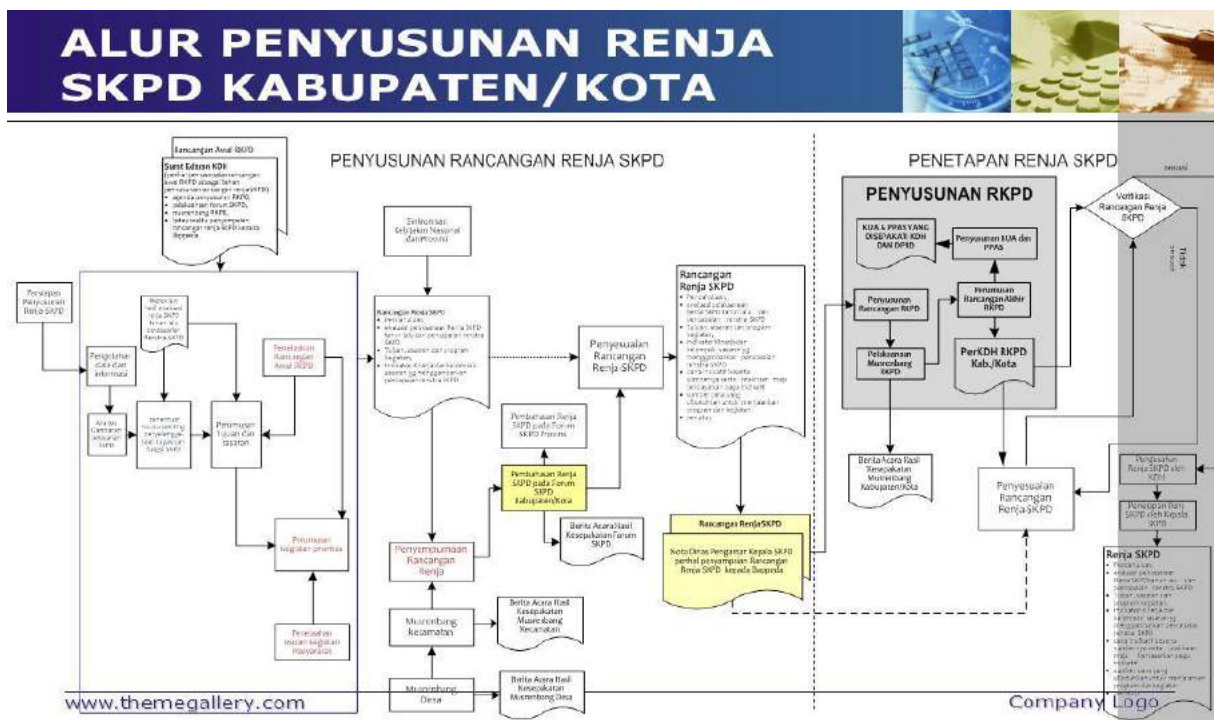
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”

Perumusan visi tersebut disesuaikan dengan bidang tugas dari BPKAD. Adapun Misi dari BPKAD adalah :

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

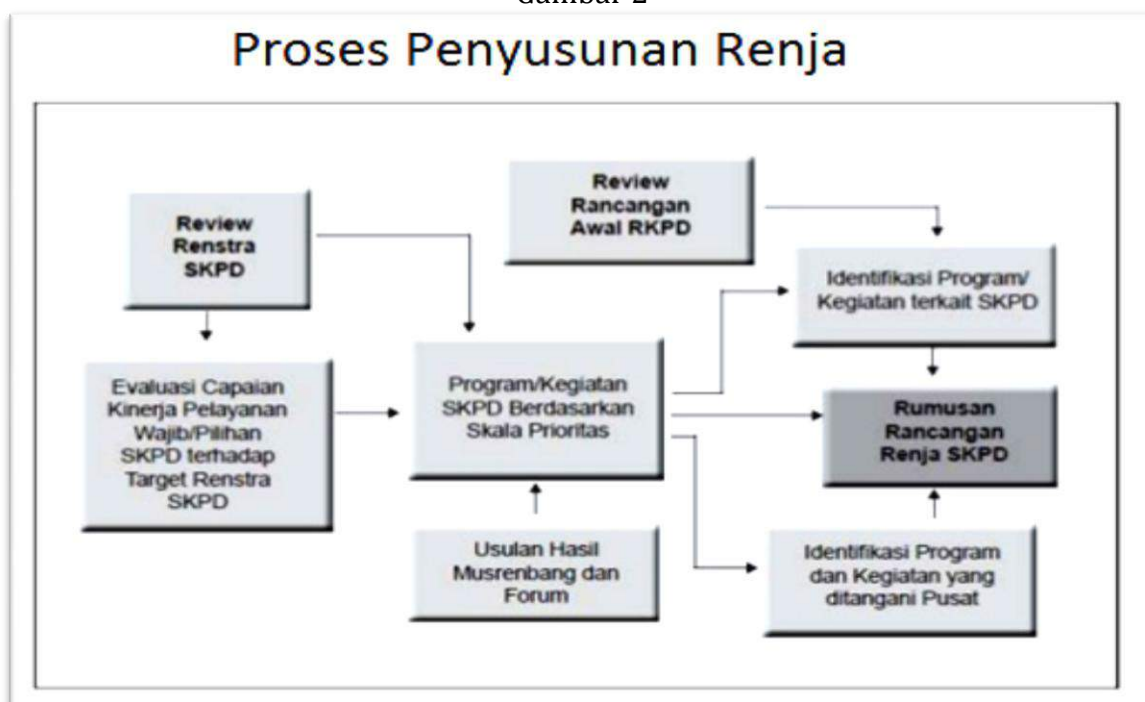
Alur tahapan penyusunan Rencana Kerja dapat dilihat dari gambar berikut ini :

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota



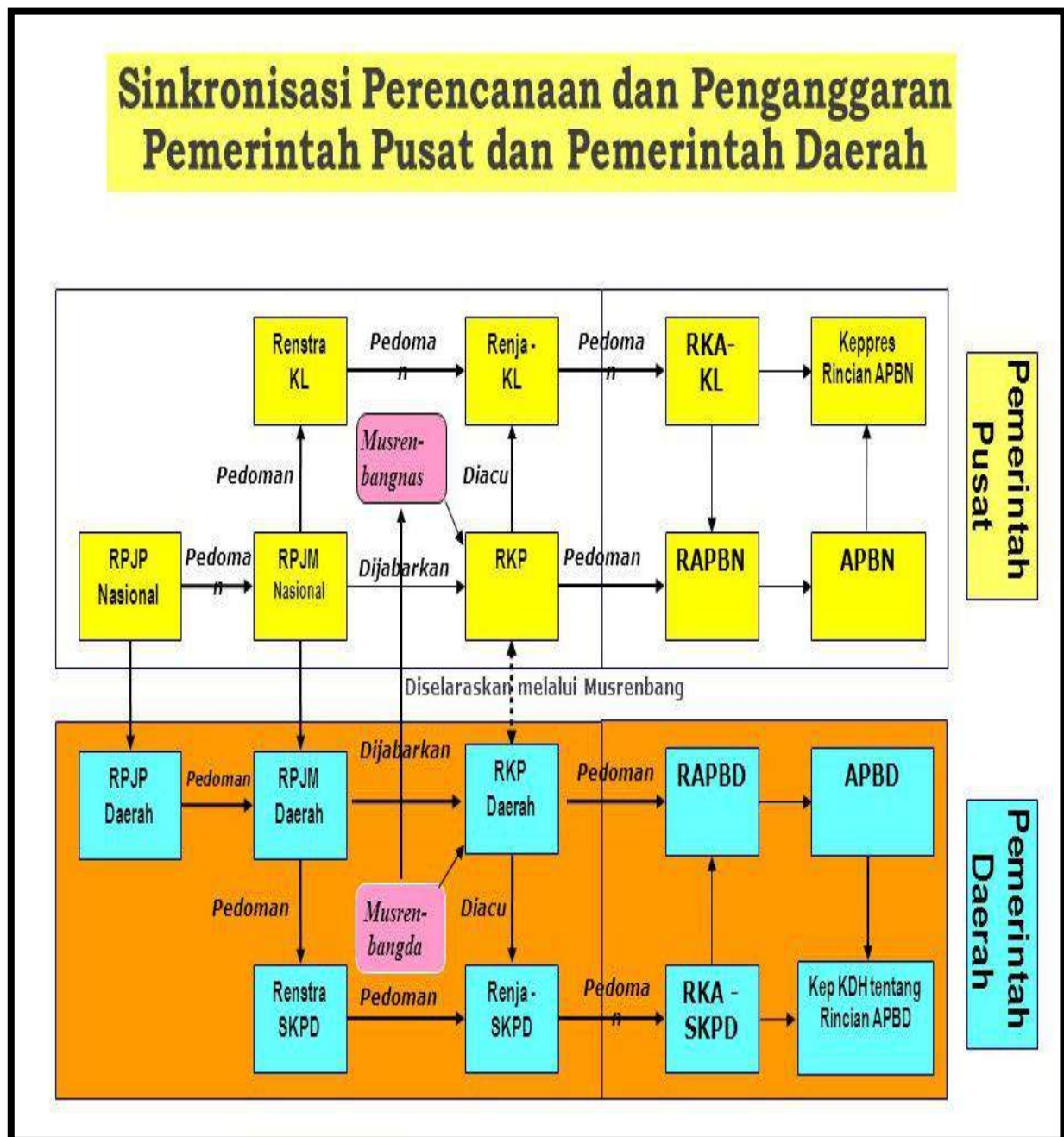
Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang secara singkat juga dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 2



Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD dapat dilihat dari gambar/bagan berikut :

Gambar 3



Rencana kerja juga sebagai bagian dari tindaklanjut Pengelola keuangan dan penyusunan APBD setiap tahunnya yang harus dipertanggungjawabkan,

adapun siklus Pengelola keuangan daerah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 79);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja tersebut untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2021 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dengan tujuannya adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional Yang Mewajibkan Setiap Instansi Pemerintah Untuk Menyusun Perencanaan Strategis.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kotabaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V PENUTUP**

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21). Selanjutnya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 79). Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan BPKAD yaitu pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kotabaru, Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Kotabaru serta Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kotabaru. Sesuai dengan Peraturan Daerah diatas bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotabaru merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku unsur pendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Aset.

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa Kepala BPKAD diberikan kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki

kewenangan dalam hal Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pelaporan Keuangan Daerah serta melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.1.1 Evaluasi Capaian RENJA BPKAD Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, BPKAD melaksanakan 6 Program 41 kegiatan. Agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar maka dilakukan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan, dimana Alokasi APBD ditahun 2020 sebesar Rp. 46.955.808.282,- dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 28.600.815.342,-
- B. Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 18.355.052.940,- yang terdiri dari 6 program dengan rincian sebagai berikut :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.630.330,-
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 638.037.984,-
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 532.263.800,-
 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.198.873.326,-
 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 460.437.900,-
 6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 924.609.600,-
- C. Dari pagu APBD 2020 sebesar Rp. 53.708.907.142,- BPKAD mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.753.038.860,- (12,57%) sehingga pagu APBDP 2020 menjadi Rp. 46.955.868.282,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 28.955.868.282,-

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 18.355.052.940,- setelah APBDP 2020 disahkan, BPKAD melaksanakan 6 program dan 41 kegiatan karena ada 4 kegiatan yang pagunya dikurangi/ditiadakan sehingga tidak dilaksanakan.

D. Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.101.947.293,- (93,58 %) yang terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.544.216.013,- (95,24%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.136.162.000,- (98,18%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp.841.601.000,- (100%).
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.604.346.000,- (95,83%).
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 783.942.000,- (100%).
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 970.000.000,- (100%).

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Per31 Desember 2019**

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
	Setelah Perubahan		Keuangan	
			Rp	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.439.341.400,00		4.154.739.106,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.611.000,00	100,00%	16.611.000,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.150.000,00	79,22%	183.798.967,00	79,17%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.360.400,00	72,31%	11.912.400,00	61,53%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2.585.710.000,00	91,05%	2.427.270.000,00	93,87%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.720.000,00	91,67%	88.185.000,00	87,55%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	137.439.000,00	100,00%	137.439.500,00	99,97%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.250.000,00	100,00%	34.628.750,00	88,23%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.230.000,00	100,00%	20.230.000,00	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.450.000,00	100,00%	34.270.250,00	82,68%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.401.000,00	100,00%	6.101.000,00	95,31%
Penyediaan Makanan dan Minuman	284.410.000,00	92,98%	248.080.000,00	87,23%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	798.570.000,00	100,00%	795.970.739,00	99,92%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60.000.000,00	100,00%	58.390.500,00	97,32%
Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	5.600.000,00	83,33%	4.110.000,00	73,39%
Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	91.440.000,00	100,00%	91.440.000,00	100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.260.184.400,00	85,12%	1.017.518.939,00	80,79%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	737.720.400,00	100,00%	608.560.041,00	82,49%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	49.287.000,00	100,00%	45.292.500,00	91,90%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.500.000,00			
Pengadaan Mebeleur	40.000.000,00	100,00%	24.365.000,00	60,91%
Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	282.800.000,00	80,00%	218.359.398,00	77,21%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	113.782.000,00	100,00%	110.412.000,00	97,04%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	26.095.000,00	74,00%	10.530.000,00	40,35%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	73.680.000,00	56,48%	68.860.000,00	93,46%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00			
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	34.430.000,00	89,01%	34.430.000,00	100,00%
Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya	39.250.000,00	89,01%	34.430.000,00	87,72%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	782.662.000,00	100,00%	775.965.000,00	99,14%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.900.000,00	100,00%	69.203.000,00	99,00%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	241.000,00	100,00%	241.000,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.071.000,00	100,00%	49.071.000,00	100,00%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	663.450.000,00	100,00%	657.450.000,00	99,10%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	14.782.784.900,00	96,95%	13.554.587.154,00	91,69%
Penyusunan Analisis Standar Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1.300.000.000,00	100,00%	1.257.815.477,00	96,76%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	290.000.000,00	100,00%	129.419.500,00	44,63%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1.175.000.000,00	90,00%	914.366.200,00	77,82%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	230.000.000,00	100,00%	193.772.100,00	84,25%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	654.500.000,00	100,00%	653.158.400,00	99,80%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	130.000.000,00	100,00%	130.000.000,00	100,00%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	850.000.000,00	100,00%	776.276.040,00	91,33%
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	108.857.300,00	100,00%	55.175.500,00	50,69%
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	91.266.600,00	100,00%	91.266.600,00	100,00%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	2.686.162.000,00	100,00%	2.615.445.338,00	97,37%
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	955.400.000,00	100,00%	867.145.500,00	90,76%
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	871.516.000,00	100,00%	862.743.380,00	98,99%
Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	700.000.000,00	100,00%	699.995.279,00	100,00%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	254.600.000,00	100,00%	216.692.700,00	85,11%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	670.200.000,00	100,00%	653.473.200,00	97,50%
Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	465.000.000,00	100,00%	295.927.250,00	63,64%
Penyusunan Laporan Kas Daerah	1.149.000.000,00	100,00%	1.064.371.490,00	92,63%
Pelatihan Penatausahaan Aset Daerah	238.800.000,00	100,00%	225.256.000,00	94,33%
Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	313.000.000,00	100,00%	279.338.800,00	89,25%
Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	328.083.000,00	100,00%	327.663.000,00	99,86%
Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	426.000.000,00	100,00%	412.559.000,00	96,84%
Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	895.400.000,00	93,00%	832.756.400,00	93,00%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	603.754.000,00	100,00%	529.226.181,00	87,66%
Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	603.754.000,00	100,00%	529.226.181,00	87,66%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	850.000.000,00	100,00%	849.870.000,00	99,98%

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	850.000.000,00	100,00%	849.870.000,00	99,98%
---	----------------	---------	----------------	--------

Dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung sebelum APBD Perubahan 2019 disahkan, BPKAD melaksanakan 7 program 55 kegiatan, setelah APBD Perubahan 2019 menjadi 7 program 52 kegiatan. Adapun kegiatan yang tidak dapat terlaksana antara lain:

1. Penyediaan Data Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan
2. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB).
3. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Bimbingan Teknis Informasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra BPKAD

A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1	OPINI BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTIP	WTP	WTP

Pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 BPKAD telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja SKPD BPKAD

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, *BPK Memberikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)*. Hal ini artinya Pemerintah Kabupaten Kotabaru

berhasil mempertahankan predikat opini WTP seperti tahun sebelumnya sehingga target berhasil dicapai. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 belum ada opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru karena masih akan dilakukan audit. Dalam hal terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang terdiri dari :

- LRA Laporan Realisasi Anggaran
- LO Laporan Operasional
- NERACA
- LPE Laporan Perubahan Ekuitas
- LPSAL Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
- LAK Laporan Arus Kas
- CALK Catatan Atas Laporan Keuangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal karena merupakan organisasi yang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya tidak melaksanakan pelayanan dasar yang terkait langsung dengan masyarakat, hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

No	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2019	2020	
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai pagu sebesar Rp.40.345.704.371,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.15.069.592.371,- serta Belanja Langsung sebesar Rp. 25.276.112.000,- dengan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 sebesar Rp.36.094.206.445,- (89,46%) Terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 21.992.259.152,- (87,01%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.101.947.293,- (93,58%) sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD BPKAD Tahun 2019.

Sedangkan untuk tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019, rata-rata capaian keuangan Renstra sebesar Rp. 91.209.378.977,- atau 54,99% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 59,73% dari total pagu Renstra di tahun 2020 sebesar Rp. 165.857.843.200,-

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dan pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 79), maka BPKAD melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Hambatan dan Langkah Antisipatif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	RESIKO/ HAMBATAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD	- Melakukan rekonsiliasi, evaluasi dan koordinasi terhadap SKPD
2	Kemampuan pengelolaan aset pengurus barang pengguna masih perlu ditingkatkan	- Melaksanakan pelatihan penatausahaan barang milik daerah
3	Penyerahan data atas permintaan PPKD dalam penyusunan laporan neraca aset mengalami keterlambatan	- Penundaan pencairan UP dan GU
4	Terbatasnya tenaga akuntansi disetiap SKPD	- Mengadakan ujian sertifikasi akuntansi - Dibentuknya Help Desk Akuntansi
5	Kurangnya pemahaman (SDM) di SKPD dalam hal penyusunan laporan keuangan	- Sosialisasi berkala tentang penyusunan laporan keuangan terkait akun-akun di SKPD
6.	Minimnya data yang dimiliki SKPD untuk disajikan pada laporan keuangan	- Rekonsiliasi data pada SKPD dan BUD sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
7	Laporan SPJ Fungsional dan laporan e-audit triwulan dari SKPD sering terlambat dan fungsi PPK pada SKPD selaku verifikasi berkas/dokumen kelengkapan SPM tidak berjalan dengan baik	- Membuat surat teguran kepada SKPD - Mengembalikan berkas/ dokumen kelengkapan SPM ke SKPD menerbitkan surat penolakan SP2D - Memberikan sanksi berupa penundaan pencairan dana
8	Masih banyaknya kesalahan berkas/ dokumen dalam hal kelengkapan pencairan dana hibah/bansos	- Para penerima dana hibah/ bansos agar lebih aktif berkoordinasi ke bidang anggaran

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sesuai dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

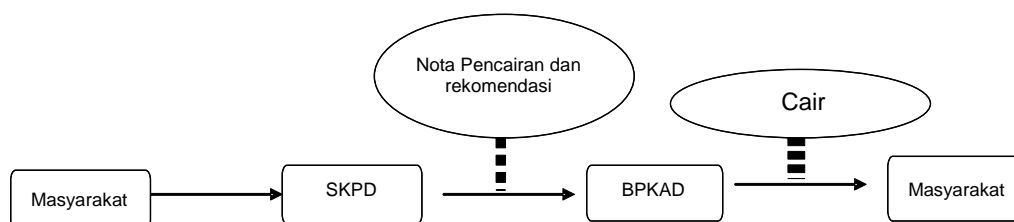
Di samping itu, dokumen Renja tersebut juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara top down dan bottom up. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Pada Tahun 2020 beberapa usulan masyarakat akan di akomodir untuk kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang disampaikan melalui usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

BPKAD selaku PPKD melaksanakan dan menatausahakan Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial seperti pada gambar dibawah ini :



Dapat dijelaskan lebih lanjut alur pencairan sesuai dengan gambar diatas adalah sebagai berikut :

1. Proposal Pencairan ditujukan kepada Bupati yang disampaikan melalui SKPD Pengelola Hibah dan Bantuan Sosial;
2. SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap proposal beserta kelengkapan persyaratan dengan menerbitkan Nota Pencairan yang dilampiri :
 - Berita Acara

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 - Pakta Integritas
 - Surat Keterangan Transfer
 - Kwitansi
 - Dokumen lainnya (KTP, Rekening Bank dan dokumen lain yang dianggap perlu);
3. Nota Pencairan tersebut disampaikan kepada BPKAD untuk diterbitkan SPD dan SP2D;
 4. Setelah proses pencairan masyarakat akan menerima transfer dana Hibah dan Bantuan Sosial melalui Bank Kal Sel;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAN DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama tahun 2021 Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan didaerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri dari :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu : Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Mengenai kebijakan nasional yang harus dijalankan oleh seluruh SKPD Tahun 2021 adalah Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mana didalam Keppres tersebut memuat kebijakan yaitu mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Sebelumnya pada tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut terjadi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang dimulai dari tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2020 juga diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dari ketiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tersebut, semuanya saling keterkaitan dalam penyusunan anggaran belanja daerah dan seluruh daerah di indonesia harus berpedoman pada ketiga aturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama satu tahun berjalan.

- Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan kedepannya. Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, maka Tujuan Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perangkat Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan perangkat daerah BPKAD penilaian dari pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang termuat pada RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 maka satuan organisasi Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Kotabaru terkait dengan pelaksanaan misi ke 7 sebagai bentuk operasional dalam mendukung pencapaian visi pelaksanaan misi-misi mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintah yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Pada Tahun Anggaran 2021 BPKAD akan menyelenggarakan 3 Program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, setelah dilakukannya pemutakhiran terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut.

Dalam Program tersebut harus menjalankan kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sikronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai di Tahun 2021.

Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2021 dan sebagai pengukur rencana capaian kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Rencana Tindak Lanjut

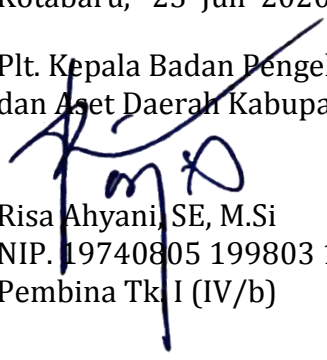
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis, lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada

masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam Perangkat Daerah untuk menjalankan kegiatannya.

Agar penerapan anggaran dapat dioperasionalkan, maka pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu kegiatan administrasi yang sangat penting dalam pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu setiap Perangkat Daerah seharusnya melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Kotabaru, 23 Juli 2020

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,



Risa Ahyani, SE, M.Si
NIP. 19740805 199803 1 001
Pembina Tk I (IV/b)

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
sampai dengan Tahun Berjalan 2021

Nama SOPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Keuangan Capaian Program (Renstra) Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2020			Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)		Catatan
					Target 2020	Realisasi 2020 s.d bulan feb	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian	Tingkat capaian %	
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7)	11= 10/4*100	12
5	BELANJA	Jumlah Belanja	204.880.022.200	21.992.259.152	25.108.091.800	3.159.029.313	12,58%	25.151.288.465	12,28	
5 2	BELANJA LANGSUNG	Jumlah Belanja Langsung	204.880.022.200	21.992.259.152	25.108.091.800	3.159.029.313	12,58%	25.151.288.465	12,28	
4 04 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.853.570.000	4.544.216.013	4.698.340.800	493.792.124	10,51%	5.013.398.137	16,25	
4 04 02 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	134.880.000	20.595.000	23.724.000	1.650.000	6,95	22.245.000	16,49	
4 04 02 01 02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.576.711.000	212.245.627	292.800.000	32.574.063	11,13	244.819.690	9,50	
4 04 02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	215.412.000	15.648.100	22.150.000	-	0,00	15.648.100	7,26	
4 04 02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan	11.650.800.000	2.474.450.000	2.578.519.800	299.513.300	11,62	2.773.963.300	23,81	
4 04 02 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	1.203.641.000	95.710.000	102.100.000	60.000	0,06	95.770.000	7,96	
4 04 02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	898.005.000	142.056.700	151.874.000	9.617.100	6,33	151.673.800	16,89	
4 04 02 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	275.930.000	36.592.500	46.400.000	2.720.000	5,86	39.312.500	14,25	
4 04 02 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik / Penerangan bangunan Kantor	136.441.000	39.107.500	39.230.000	1.278.000	3,26	40.385.500	29,60	
4 04 02 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.390.000	30.780.000	41.450.000	2.998.000	7,23	33.778.000	19,37	
4 04 02 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	49.730.000	6.635.000	6.600.000	260.000	3,94	6.895.000	13,86	
4 04 02 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang mendapat makanan dan minuman	2.110.398.000	305.370.000	328.090.000	20.970.000	6,39	326.340.000	15,46	
4 04 02 01 18	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	5.430.812.000	1.008.614.586	825.703.000	86.926.661	10,53	1.095.541.247	20,17	

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7)	11= 10/4*100	12
4	04	02	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah Pegawai Non PNS	4.822.020.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	01	21	Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	366.000.000	121.701.000	122.100.000	35.225.000	28,85	156.926.000	111,30	
4	04	02	01	22	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	141.000.000	10.100.000	10.100.000	-	0,00	10.100.000	7,16	
4	04	02	01	25	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	667.400.000	24.610.000	107.500.000	-	0,00	24.610.000	3,69	
4	04	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Produktifitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	54.212.590.300	848.032.197	1.136.162.000	56.419.490	4,97	904.451.687	1,67	
4	04	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	39.413.532.800	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	688.809.500	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	1.647.811.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor	914.002.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	02	11	Pengadaan Buku/Kepustakaan	Jumlah Buku / Kepustakaan	19.170.000	-	-	-	#DIV/0!	42.209.490	220,19	
4	04	02	02	21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan	8.103.000.000	720.430.197	985.880.000	42.209.490	4,28	720.430.197	8,89	
4	04	02	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	2.275.000.000	-	-	-	#DIV/0!	12.210.000	0,54	
4	04	02	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional	960.000.000	113.152.000	113.782.000	12.210.000	10,73	115.152.000	12,00	
4	04	02	02	28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	191.265.000	14.450.000	36.500.000	2.000.000	5,48	14.450.000	7,55	
4	04	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan	1.201.950.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	417.250.000	-	-	-	0,00	-	0,00	
4	04	02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	322.150.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	03	06	Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	462.550.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kualitas dan kuantitas SDM	2.992.140.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	2.561.040.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7)	11= 10/4*100	12
4	04	02	05	04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur BPKAD yang Dilaksanakan	431.100.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00	
4	04	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Tingkat kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	4.460.576.000	830.551.000	930.301.000	4.321.500	0,46	834.872.500	18,72	
4	04	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	584.300.000	149.860.000	161.060.000	-	0,00	149.860.000	25,65	
4	04	02	06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen laporan	1.446.000	241.000	241.000	-	0,00	241.000	16,67	
4	04	02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	92.830.000	19.000.000	19.000.000	4.321.500	22,74	23.321.500	25,12	
4	04	02	06	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan E-Audit ke BPK RI	3.782.000.000	661.450.000	750.000.000	-	0,00	661.450.000	17,49	
4	04	02	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah	98.457.795.900	14.167.713.646	16.589.346.000	1.649.007.399	9,94	14.226.424.336	14,45	
4	04	02	17	01	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah dokumen analisa standar belanja	2.125.000.000	-	300.000.000	-	0,00	-	0,00	
4	04	02	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	10.625.000.000	1.584.794.748	1.800.000.000	53.415.089	2,97	1.638.209.837	15,42	
4	04	02	17	07	Penyusunan rancangan Peraturan KDH Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	1.736.000.000	211.447.625	325.000.000	65.996.150	20,31	277.443.775	15,98	
4	04	02	17	08	Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	7.539.100.000	1.270.896.750	1.337.050.000	-	0,00	1.270.896.750	16,86	
4	04	02	17	09	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD	1.438.000.000	253.699.650	255.000.000	-	0,00	253.699.650	17,64	
4	04	02	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.728.000.000	647.227.950	820.000.000	12.530.000	1,53	659.757.950	17,70	
4	04	02	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.675.000.000	150.000.000	150.000.000	22.000.000	14,67	172.000.000	10,27	
4	04	02	17	13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	7.277.100.000	1.391.593.863	1.340.000.000	87.250.000	6,51	1.478.843.863	20,32	

1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7)	11= 10/4*100	12
4	04	02	17	14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	4.130.000.000	86.092.150	365.000.000	-	0,00	86.092.150	2,08
4	04	02	17	15	Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2.204.200.000	-	210.000.000	-	0,00	-	0,00
4	04	02	17	16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Jumlah dokumen Buku Induk Inventaris (BII) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen Sensus Aset/Barang Daerah	14.144.000.000	2.448.607.611	2.488.978.200	463.977.500	18,64	2.912.585.111	20,59
4	04	02	17	18	Revaluasi Apraisal Aset / Barang Daerah	Jumlah dokumen data nilai aset Per SKPD	4.869.735.900	936.832.550	998.151.000	175.967.000	17,63	1.112.799.550	22,85
4	04	02	17	21	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	2.286.460.000	826.801.180	930.188.000	103.207.000	11,10	930.008.180	40,67
4	04	02	17	23	Peningkatan Manajemen data gaji PNSD	Jumlah Data data SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	4.848.100.000	807.191.485	843.253.800	84.602.360	18,59	891.793.845	18,39
4	04	02	17	28	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	2.161.000.000	250.280.500	455.000.000	-	0,00	250.280.500	11,58
4	04	02	17	29	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten	3.378.000.000	598.456.150	860.000.000	76.850.000	15,04	675.306.150	19,99
4	04	02	17	33	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas	2.745.000.000	458.199.600	511.000.000	174.670.800	34,18	632.870.400	23,06
4	04	02	17	34	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah	8.955.000.000	901.994.125	1.127.525.000	81.842.500	7,26	983.836.625	10,99
4	04	02	17	35	Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah peserta Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah	1.733.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00
4	04	02	17	36	Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah	2.475.000.000	-	-	-	#DIV/0!	-	0,00
4	04	02	17	40	Peningkatan dan pengendalian anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen peningkatan dan pengendalian anggaran Belanja Daerah	1.956.100.000	77.650.000	77.800.000	-	0,00	77.650.000	3,97
4	04	02	17	54	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	3.259.000.000	547.730.400	600.000.000	88.500.000	14,75	636.230.400	19,52

1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7)	11= 10/4*100	12
4	04	02	17	60	Manejemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD pemerintah daerah dan Penghapusan BMD	3.170.000.000	718.217.309	795.400.000	158.199.000	19,89	876.416.309	27,65	
4	04	02	18		Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten / kota	Tingkat pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah	2.953.000.000	657.079.696	783.942.000	43.846.200	5,59	700.925.896	23,74	
4	04	02	18	07	Peningkatan sarana pelayanan administrasi keuangan	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Kotabaru	2.953.000.000	657.079.696	783.942.000	43.846.200	5,59	700.925.896	23,74	
4	04	02	19		Program pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Proposi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	9.748.400.000	944.666.600	970.000.000	911.642.600	93,98	1.856.309.200	19,04	
4	04	02	19	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa(APBDes)	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	9.748.400.000	944.666.600	970.000.000	911.642.600	93,98	1.856.309.200	19,04	

[illegible]

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SOPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisa
				TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	Tahun 2021 (th n)	TAHUN 2019 (n-2)	TAHUN 2020 (n-1)	Tahun 2021 (th n)	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13
10	Jumlah terbitan bahan bacaan		7.095 Kali Penyediaan Bahan Bacaan	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	
11	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman		1.053 Kali penyediaan makanan dan minuman (harian pegawai, rapat, tamu, jamuan masal)	24.277 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	24.277 Orang	
12	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke luar daerah		742 kali rapat koordinasi dan Konsultasi	180 OK	190 OK	190 OK	180 OK	180 OK	185 OK	
13	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah		252 kali rapat koordinasi dan Konsultasi	65 OK	70 OK	70 OK	65 OK	65 OK	65 OK	
14	Jumlah Jasa Pengumuman dan Propaganda		8 Kali Penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	16 Kali penyediaan	
15	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI			3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	3 Kali Pelaksanaan	
	Jumlah Perlengkapan Kantor		31 Kali Pengadaan (168 unit terdiri dari 59 unit mobil, 107 unit motor dan 2 unit kendaraan 3)	25 Unit	16 Unit	16 Unit	25 Unit	25 Unit	16 Unit	
16	Jumlah Perlengkapan Kantor		15 Kali pengadaan	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	16 Unit	16 Unit	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	1 Kali Pengadaan (30 Unit)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kotabaru

Nama SKPD : BPKAD Kabupaten Kotabaru

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2020	Pagu Indikatif 2021 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2021	Kebutuhan Dana 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG		Jumlah Belanja Langsung		25.108.091.800	BELANJA LANGSUNG		Jumlah Belanja Langsung		25.108.091.800	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat	5.204 Lembar	23.724.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat	5.204 Lembar	23.724.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Langganan (80 Kali Pembayaran)	292.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Langganan (80 Kali Pembayaran)	292.800.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit (28 Kali Pemeliharaan Service Mobill)	22.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit (28 Kali Pemeliharaan Service Mobill)	22.150.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	2.012 Orang Kali Pembayaran (82 Orang)	2.578.519.800	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah pembayaran jasa tenaga administrasi keuangan	2.012 Orang Kali Pembayaran (82 Orang)	2.578.519.800	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5 Kali Jasa (27 Kali Pembayaran)	102.100.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pembayaran petugas kebersihan kantor	5 Kali Jasa (27 Kali Pembayaran)	102.100.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 Set	151.874.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Set	151.874.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Set	46.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan pembayaran barang cetakan dan penggandaan	12 Set	46.400.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Set	39.230.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan kantor	12 Set	39.230.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Set	41.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan	12 Set	41.450.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2020	Pagu Indikatif 2021 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2021	Kebutuhan Dana 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah terbitan bahan bacaan	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	6.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Kali terbitan (1.825 kali Penyediaan Bahan Bacaan)	6.600.000	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotabaru	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	26.297 Orang	328.090.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotabaru	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	26.297 Orang	328.090.000	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi ke luar daerah	103 Orang Kali	825.703.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	103 Orang Kali	825.703.000	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi kedalam daerah	80 Orang Kali	122.100.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah	80 Orang Kali	122.100.000	
14	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kab. Kotabaru	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	5 Kali Penyediaan	10.100.000	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda	5 Kali Penyediaan	10.100.000	
15	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	4 Kali Pelaksanaan	107.500.000	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	4 Kali Pelaksanaan	107.500.000	
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan	1 Unit	985.880.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 Unit	985.880.000	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan dinas/operasional	4 Unit (12 Kali Pemeliharaan / Penyediaan)	113.782.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan mobil dinas	4 Unit (12 Kali Pemeliharaan / Penyediaan)	113.782.000	
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan Kantor	5 Unit	36.500.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung/kantor	5 Unit	36.500.000	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	18 Dokumen	161.060.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18 Dokumen	161.060.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2020	Pagu Indikatif 2021 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2021	Kebutuhan Dana 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	241.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1 Dokumen	241.000	
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	19.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	19.000.000	
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah pelaporan E - Audit ke BPK RI	12 Kali Pelaporan E-Audit ke BPK RI	750.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah pelaksanaan pembuatan dokumen laporan evaluasi	12 Kali Pelaporan E-Audit ke BPK RI	750.000.000	
23	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 Dokumen	300.000.000	
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1 Dokumen	1.800.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1 Dokumen	1.800.000.000	
25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	325.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	325.000.000	
26	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.337.050.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.337.050.000	
27	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 Dokumen	255.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 Dokumen	255.000.000	
28	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	820.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	820.000.000	
29	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2020	Pagu Indikatif 2021 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2021	Kebutuhan Dana 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 Aplikasi SIMDA	1.340.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 Aplikasi SIMDA	1.340.000.000	
31	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Sosialisasi	365.000.000	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Sosialisasi	365.000.000	
32	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Bimtek	210.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Bimtek	210.000.000	
33	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Buku Induk Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen sensus aset/barang daerah	4 Dokumen (189 Jenis Dokumen)	2.488.978.200	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru	4 Dokumen (189 Jenis Dokumen)	2.488.978.200	
34	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD	3 Dokumen	998.151.000	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data nilai aset	3 Dokumen	998.151.000	
35	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 Dokumen	930.188.000	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 Dokumen	930.188.000	
36	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	58 Data SKPD	843.253.800	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Kab. Kotabaru	Jumlah data pegawai per SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	58 Data SKPD	843.253.800	
37	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 Dokumen	455.000.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 Dokumen	455.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2020	Pagu Indikatif 2021 (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Target Capaian 2021	Kebutuhan Dana 2021 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Kotabaru	1 Dokumen	860.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah buku pelaporan keuangan akhir tahun Pemkab Kotabaru	1 Dokumen	860.000.000	
39	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	2 Dokumen	511.000.000	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas	2 Dokumen	511.000.000	
40	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah	19 Dokumen	1.127.525.000	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah/Penyusunan Laporan Kas Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Kas Daerah	19 Dokumen	1.127.525.000	
41	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	1 Dokumen	77.800.000	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	1 Dokumen	77.800.000	
42	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 Dokumen	600.000.000	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 Dokumen	600.000.000	
43	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen RKBMD pemerintah daerah dan Penghapusan BMD	2 Dokumen	795.400.000	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen RKBMD pemerintah daerah dan Penghapusan BMD	2 Dokumen	795.400.000	
44	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	60 Dokumen register SP2D, 4 kali Laporan DAK dan 12 kali/bulan Laporan Realisasi Anggaran SP2D	783.942.000	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru	60 Dokumen register SP2D, 4 kali Laporan DAK dan 12 kali/bulan Laporan Realisasi Anggaran SP2D	783.942.000	
45	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Kab. Kotabaru	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	198 RAPBDes	970.000.000	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Kab. Kotabaru	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	198 RAPBDes	970.000.000	

Tabel 4.1
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2021
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama SOPD : BPKAD Kabupaten Kotabaru

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	Target Capaian 2020	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3		5	6	7	8
	BELANJA LANGSUNG		Jumlah Belanja Langsung		25.108.091.800		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat	5.204 Lembar	23.724.000	KUD/APBD. II	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Langganan (80 Kali Pembayaran)	292.800.000	KUD/APBD. II	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional	25 Unit (28 Kali Pemeliharaan Service Mobil)	22.150.000	KUD/APBD. II	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan dan Kegiatan	2.012 Orang Kali Pembayaran (82 Orang)	2.578.519.800	KUD/APBD. II	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	5 Kali Jasa (27 kali pembayaran)	102.100.000	KUD/APBD. II	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah jenis alat tulis kantor	12 Set	151.874.000	KUD/APBD. II	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Set	46.400.000	KUD/APBD. II	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan kantor	12 Set	39.230.000	KUD/APBD.II	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Set	41.450.000	KUD/APBD.II	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	Target Capaian 2020	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3		5	6	7	8
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah terbitan bahan bacaan	5 Kali Terbitan (1.825 Kali Penyediaan Bahan Bacaan)	6.600.000	KUD/APBD.II	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Kotabaru	Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman	26.297 Orang	328.090.000	KUD.APBD.II	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Diluar Daerah Kab. Kotabaru	Jumlah Rapat Koordinasi, Konsultasi ke luar daerah	103 Orang Kali	825.703.000	KUD.APBD.II	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kab. Kotabaru	Jumlah rapat koordinasi, konsultasi kedalam daerah	80 Orang Kali	122.100.000	KUD/APBD.II	
14	Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Kab. Kotabaru	Jumlah jasa pengumuman dan propaganda	5 Kali Penyediaan	10.100.000	KUD/APBD.II	
15	Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI	4 Kali Pelaksanaan	107.500.000	KUD/APBD.II	
16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeliharaan	1 Unit	985.880.000	KUD/APBD.II	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan Kantor	4 Unit (12 Kali Pemeliharaan / Penyediaan)	113.782.000	KUD/APBD.II	
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Kotabaru	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional	5 Unit	36.500.000	KUD/APBD.II	
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	18 Dokumen	161.060.000	KUD/APBD.II	
20	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	241.000	KUD/APBD.II	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	Target Capaian 2020	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3		5	6	7	8
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	19.000.000	KUD/APBD.II	
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah pelaporan E - Audit ke BPK RI	12 Kali Pelaporan E-Audit ke BPK RI	750.000.000	KUD/APBD.II	
23	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen analisa standar belanja	1 Dokumen	300.000.000	KUD/APBD.II	
24	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang APBD	1 Dokumen	1.800.000.000	KUD/APBD.II	
25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	5 Dokumen	325.000.000	KUD/APBD.II	
26	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD	1 Dokumen	1.337.050.000	KUD/APBD.II	
27	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	5 Dokumen	255.000.000	KUD/APBD.II	
28	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	820.000.000	KUD/APBD.II	
29	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	150.000.000	KUD/APBD.II	
30	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD SKPD	1 Aplikasi SIMDA Keuangan	1.340.000.000	KUD/APBD.II	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	Target Capaian 2020	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3		5	6	7	8
31	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Sosialisasi	365.000.000	KUD/APBD.II	
32	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	2 Kali Kegiatan Bimtek	210.000.000	KUD/APBD.II	
33	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen Buku Induk Inventaris (BII) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen Sensus Aset / Barang Daerah	4 Dokumen (189 Jenis Dokumen)	2.488.978.200	KUD/APBD.II	
34	Revaluasi Apraisal Aset/Barang Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD	3 Dokumen	998.151.000	KUD/APBD.II	
35	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah	60 Dokumen	930.188.000	KUD/APBD.II	
36	Peningkatan Manajemen Data Gaji PNSD	Kab. Kotabaru	Jumlah data pegawai per SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan	58 Data SKPD	843.253.800	KUD/APBD.II	
37	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten	1 Dokumen	455.000.000	KUD/APBD.II	
38	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemkab Kotabaru	1 Dokumen	860.000.000	KUD/APBD.II	
39	Penyusunan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen DPA SKPD/DPPA-SKPD dan anggaran kas SKPD	2 Dokumen	511.000.000	KUD/APBD.II	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	Target Capaian 2020	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3		5	6	7	8
40	Penyusunan Laporan Kas Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen laporan kas daerah	19 Dokumen	1.127.525.000	KUD/APBD.II	
41	Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Laporan Anggaran Belanja	1 Dokumen	77.800.000	KUD/APBD.II	
42	Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengendalian Informasi Keuangan Daerah (IKD)	1 Dokumen	600.000.000	KUD/APBD.II	
43	Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen RKBMD pemerintah daerah dan Penghapusan BMD	2 Dokumen	795.400.000	KUD/APBD.II	
44	Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Kab. Kotabaru	Jumlah dokumen register SP2D SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru	60 Dokumen register SP2D, 4 kali Laporan DAK dan 12 kali/bulan Laporan Realisasi Anggaran SP2D	783.942.000	KUD/APBD.II	
45	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa (APBDes)	Kab. Kotabaru	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	189 RAPBDes	970.000.000	KUD/APBD.II	